Instrumen Kebijakan Fiskal Sebagai Faktor Utama Dalam Pemulihan Ketahanan Perekonomian Nasional Dampak Adanya Covid-19

Abi Rizky Pratama 220321100013

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura

BAB I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pada tahun 2020 adalah dimana tahun yang sangat tidak tertebak dan sangat banyak membawa perubahan pada dunia. Dimana di tahun 2020 seluruh dunia sempat di hebohkan dengan wabah virus corona atau yang biasa disebut covid-19. Wabah covid-19 pertama kali terdeteksi di negara China tepatnya di daerah Wuhan provinsi Hubei pada tanggal 1 Desember 2019(Aqmarina and Furqon, 2020), namun menyebar ke Indonesia setelah terdapat pasien yang terindikasi terkena virus covid-19 di Depok, Jawa Barat, yakni seorang ibu berumur 64 tahun serta anak perempuannya yang berumur 31 tahun. Keduanya tertular virus corona akibat tertular warga Jepang yang sempat dating ke Indonesia pada Februari 2020. dan menyebar secara cepat ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun itu seluruh dunia dipaksa untuk melakukan perubahan, para manusia di paksa untuk melakukan aktifitas di dalam rumah, seperti bekerja dari rumah masing-masing atau *Work From Home* (WFH), belajar secara daring melalui aplikasi-aplikasi zoom meeting(Alfarisy *et al.,* 2020). Bagaiamana tidak, virus yang sangat cepat menularkan wabahnya melalui udara ini sangat mematikan. Para korban yang terjangkit penyakit ini akan merasakan sesak nafas, tidak bisa mencium, seperti orang flu. Para korban yang terjangkit juga bisa saja tidak ada ciri-ciri terjangkit wabah covid-19 atau orang tanpa gejala.

Wabah Covid-19 sangat membuat pemerintah kewalahan dalam mengatasi permasalahan yang ada akibat wabah covid-19 seperti menurunnya perekonomian di Indonesia karena saat adanya covid-19 pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan guna mengurangi lajur penularan covid-19 salah satunya Pembatasan Kerumunan Masyarakat (PKM), *lockdown*, dan dilanjut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu dengan membatasi masyarakat untuk mengurangi mobilitas dengan tidak keluar rumah(Nasruddin and Haq, 2020). Selain itu masyarakat juga diharuskan untuk menjaga jarak sejauh 2 meter, selain itu juga membatasi komunikasi secara langsung karena pemerintah juga melarang para masyarakat untuk bersentuhan secara langsung.

Pada saat pandemi covid-19 melanda di seluruh Indonesia sangat berdampak pada perekonomian masyarakat karena dengan adanya pembatasan itu banyak para pekerja yang merasakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena adanya penurunan pendapatan dari toko, pabrik, dan pelaku usaha lainnya(Suryani). Dalam kasus ini pemerintah tentunya tidak diam saja pemerintah melakukan beberapa upaya, salah satunya dengan kebijakan fiskal atau perpajakan. Kebijakan fiskal sendiri merupakan penyesuaian pendapatan dan juga pengeluaran negara sesuai terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dan pelaksanaanya yang berwenang disini adalah DPR untuk mengubah besaran pajak yang harus di penuhi wajib pajak. Karena sektor penerimaan pajak merupakan instrument utama ketahann ekonomi nasional. Disini peran masyarakat juga sangat berperan guna memperbaiki pembangunann hukum dan ketahanan ekonomi nasional dengan cara membayar pajak. Tujuan dengan adanya kebijakan fiskla ini agar menciptakan perekonomian yang sejahtera(Nafi'ah, Arifin and Haq, 2021)

2. Rumusan Masalah
   a. Saat pandemi covid-19 melanda Indonesia perekonomian di Indonesia sempat mengalami krisis, apa upaya yang dapat dilakukan pemerintah guna mestabilkan ketahanan perekonomian nasional ini?
   b. Apa pengaruh kebijakan fiskal terhadap ketahanan perekonomian nasional?
   c. Apakah terdapat korelasi antara Kebijakan Fiskal dengan APBN yang menjadi penopang ketahanan perekonomian nasional?

3. Tujuan
   a. Bertujuan mengetahui apa strategi dan upaya yang dilakukan pemerintah terhadap ketahanan perekonomian nasional.
   b. Untuk mengetahui peran kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal yang bertujuan mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia dampak adanya covid-19.
   c. Mengetahui korelasi antara kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah dengan APBN yang diharapakan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia yang sempat mengalami penurunan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori

2.1.1 Covid-19

Kekacauan dan kebingungan itulah yang bisa digambarkan pada saat wabah covid-19 melanda hampir di seluruh dunia. Dimana pada tahun 2020 hampir seluruh dunia terkena musibah yang membuat kekacauan yakni adanya virus covid-19. Awalnya virus ini dikenal dekan virus corona, namun kemudian WHO (*World Healt Organization*) merubah dan memberikan nama baru menjadi Coronavirus Disease atau COVID-19 karena adanya virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-Co V-2. Pandemi Covid-19 pertama kali terdeteksi di negara China tepatnya di daerah Wuhan provinsi Hubei pada tanggal 1 Desember 2019 Covid-19 ini memiliki gejala yang berbeda dengan penyakit lainnya seperti flu, batuk, radang tenggorokan. Walaupun gejala yang dirasakan pasien covid-19 ini hampir sama dengan gejala penyakit flu, batuk, radang tenggorokan, covid-19 lebih mematikan karena penularan virusnya sangat cepat dan melalui berbagai elemen seperti udara(Supriatna, 2020a).

2.1.2 Definisi Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal atau perpajakan merupakan suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan mengenai pengeluaran serta penerimaan negara yang mengarah ke pajak serta pinjaman. Tak hanya mengarah ke permasalahan pajak tapi juga mengarah ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau permasalahan perbelanjaan negara. APBN merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang telah di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN juga bisa disebut suatu daftar sistematis serta jelas adanya, yang membahas mengenai perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Pada umumnya kebijakan fiskal yaitu strategi pemerintah dalam menentukan besarnya pengeluaran dan juga jumlah pendapatan yang berpengaruh terhadap perekonomian negara(Krisna, 2020). Menurut peneliti terdahulu kebijakan fiskal mengembang yang dilakukan yaitu meningkatkan pengeluaran pemerintah namun tanpa adanya peningkatan sumber pajak yang menjadi sumber utama keuangan pemerintahan dan mengakibatkan peningkatan pada defisit negara(Isnaini, 2017).

Adapun tujuan adanya kebijakan fiskal dalam aktivitas perekonomian negara yaitu kestabilkan, pemeratakan, serta peningkatan pendapatan negara(Hanifa, Wajuba and Fisabilillah, 2021). Dampak dari adanya kebijakan fiskal pada pertumbuhan ekonomi diharapkan selalu positif, namun lain dengan jika dampak adanya inflasi diharap bernilai negatif(Nafia'ah, Arifin and Haq, 2021). Salah satu cara untuk menjaga kemapanan ekonomi jangka pendek di Indonesia adalah dengan menggunakan kebijakan fiskal. Peningkatan pendapatan negara, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara, dapat digunakan untuk mencapai kebijakan fiskal ini. Hal yang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil yang disebabkan oleh wabah

virus corona. Wabah ini merusak perekonomian Indonesia secara signifikan, dan pemerintah harus segera mengatasi tekanan inflasi. Harga pasar juga harus ditstabilkan melalui kebijakan fiskal(Jurnal and Saham, 2021).

2.2 Konsep Konsep Pemikiran

Terdapat beberapa pemikiran-pemikiran dari beberapa ahli mengenai kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal, walaupun pandangan dari beberapa para ahli berbeda, namun inti atau maksud dari pemikiran mereka sama. Seperti pemikiran Wolfson yang mengatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebiajakan pemerintah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dengan adanya kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, pemanfaatan sumberdaya yang ada, serta menentukan harga barang serta jasa dari perusahaan(Atmaja and Verawati, 2021). Namun lain halnnya dengan pemikiran Samuelson dan Nordhaus yang berpendapat bahwa kebijakan fiskal suatu kegiatan perpajakan serta pengeluaran masyarakat untuk menekankan perubahan harga di siklus bisnis dan juga berperan penting terhadap ketahan perekonomian nasional, menggunakan tenaga kerja yang banyak, bebas dari laju kenaikan harga pada barang maupun jasa seacara konstan dengan cepat yang tinggi dan bisa berubah-ubah(Seftarita, 2005).

2.3 Variabel dan Indikator yang Dibahas

Pada hal ini variable yang dibahas yaitu mengenai adanya covid-19 yang berkorelasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Karena dampak dari adanya pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat yang juga berkorelasi dengan pendapatan negara. Maka dari itu dengan adanya kebijakan fiskal diharapkan mampu mestabilakan dan mengembalikan perekonomian negara yang negatif akibat pandemi covid-19 menjadi positif kembali. Instrument terbesar dalam penumbuhan perekonomian di Indonesia masih ada di pajak(Rahmawati, 2016). Serta dengan adanya kebijakan fiskal diharap bisa mengatur pemasukan, dan pengeluaran perbelanjaan negara. Upaya pemerintah untuk membantu masyarakat untuk memajukan perekonomian akibat dampak covid-19 juga akan dibahas dalam pembahasan ini(Heliany, 2021).

2.4 Hasil Pene;itian Terdahulu

Menurut Angeline Wijayanti dan Ngadiman dengan jurnal yang membahas topik peran kebijakan fiskal saat perekonomian Indonesia terdampak covid-19 dengan hasi yang disampaikan bahwa virus Covid-19 berdampak negative terhadap pertumbuhan ekonomi terutamannya di negara Indonesia baik di sisi konsumsinya maupun produksinya. Pemerintah Indonesia mengatur strategi dan mengesahkan Undang-Undang dalam bidang keringanan perpajakan dan isentif pajak yang diberikan pemerintah guna memberikan kesempatan untuk *cash flow* perusahaan yang diharapkan bisa mengembalikan perekonomian di Indonesia serta menghindari adanya PHK akibat dampak Covid-19(Wijayanti, no date).

Tak jauh berbeda dengan jurnal sebelumnya, pada jurnal yang membahas mengenai upaya dari kebijakan fiskal dalam penanggulangan dampak akibat covid-19 yang dibuat oleh Dina Eva dan Rasinta Ria, mereka berpendapat bahwa instrumen utama dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih ada di penerimaan pajak. Namun

kerena adanya kebijakan pemerintah guna memberhentikan penyebaran virus Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) berakibat menurunnnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negri (PPN DN). Mengatasi permasalahan itu pemrerintah memberikan keistimewaan perpajakan berupa relasasi pembayaran PPh Pasal 29 OP dan pelaporan SPT PPh OP. Serta diharapkan usaha makro yang sudah dilakukan dapat menumbuhkan lagi perekonomian dalam negri mapun luar negri yang telah terdampak Covid-19 dan mengalami penurunan. Pandemi ini sangat tidak menguntungkan dalam hal perpajakan sehingga untuk meningkatkan penerimaan negara, upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan pajak secara online (digital) atau Perdagangan Melalui Sistem elektronik (PMSE). Dalam membantu masyarakat pemerintah juga melakukan beberapa upaya seperti pemenuhan dalam bidang kesehatan, menaikkan kartu anggran kerja, nasabah KUR mendapat keringanan angsuran, anitipasi defisit APBN, subsidi tarif listrik, subsidi BBM(Silalahi and Ginting, 2020).

BAB III

PENDEKATAN DAN METODE

Dalam konteks yang dibahas mengenai implementasi kebijakan fiskal dalam masa covid-19 untuk mengatasi krisis ekonomi yang ada di negara Indonesia ini yaitu dilakukan pendekatan secara deskriptif kualitatif. Yaitu pendekatan berupa pendiskripsian atau sifat deskriptif guna menjawab pertanyaan seputar apa, dimana, siapa, bagaimana, serta kapan pada penelitian ini. Pendekatan dengan metode ini memiliki alur induktif yang dimaksud yaitu diawali dengan adanya kejadian penjelas lalu ditarik kesimpulannya dari kejadian itu(Subandi, 2011). Teknik pengumpulan data diambil dari hasil observasi atau pengamatan dan survey kualitatif. Hal yang disoroti disini meliputi kebijakan pemerintah mengenai pencegahan serta penanganan penularan dan persebaran virus covid-19. Data yang telah terkumpul lalu di analisis secara deskriptif kualitatif, proses awal hingga akhir ini brtujuan menjawab tujuan penulis dengan cara menarasikan data yang telah di analisa guna menjawab tujuan penelitian(Alia Akhmad STMIK Duta Bangsa Surakarta, 2015).

BAB IV

PEMBAHASAN

Persebaran Covid-19 di Indonesia

Tahun 2020 menjadi tahun yang tidak menentu dan mengubah dunia. dimana wabah virus corona, juga dikenal sebagai COVID-19, menggemparkan dunia pada tahun 2020. Di negara China, virus ini pertama kali muncul di daerah Wuhan provinsi Hubei pada awal Desember tahun 2019 tepatnya tangga 1. Namun, virus tersebut kemudian menyebar ke Indonesia setelah seorang ibu yang saat itu berusia 64 tahun dan anak perempuannya yang berusia 31 tahun terinfeksi di Depok, Jawa Barat. Warga Jepang yang pergi ke Indonesia pada Februari 2020 tertular virus corona, sehingga keduanya tertular. dan cepat menyebar ke hampir seluruh Indonesia(Supriatna, 2020a). Virus ini sangat mematikan karena penularannya sangat cepat, dan gejala yang dikeluarkan seperti orang sakit flu, batuk. Adapun orang yang terinfeksi virus corona ini tidak terindikasi gejala yang dirasakan atau biasa disebut orang tanpa gejala(Wayan Wardani, no date).

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengurangi Persebaran Covid-19

Pada saat pandemi mulai menyebar luar hampir ke seluruh dunia, seluruh dunia terpaksa mengalami perubahan; orang-orang diminta untuk melakukan aktivitas di dalam rumah seperti bekerja atau Work From Home (WFH), serta belajar secara online melalui aplikasi Zoom meeting. Bagaiamana tidak, virus ini menyebarkan wabahnya dengan sangat cepat di udara. Korban penyakit ini mungkin mengalami gejala flu atau tidak memiliki gejala seperti orang flu. Mereka juga mungkin mengalami sesak napas dan tidak bisa mencium seperti orang flu. Pembatasan Kerumunan Masyarakat (PKM), yang membatasi orang untuk tidak keluar rumah dan mengurangi mobilitas, adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi penularan COVID-19 dan mengatasi masalah lain yang muncul sebagai akibat dari pandemi. Selain itu pemerintah melarang orang bersentuhan secara langsung dan mewajibkan orang untuk menjaga jarak dua meter. Kebijakan selanjutnya pemerintah melakukan yang lebih ketat lagi yaitu dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau biasa disebut PSBB. Dengan diberlakukannya PSBB perekonomian para masyarakat menjadi semakin mengalami krisis karena berdampak dengan adanya pengurangan pekerja di kantor-kantor dan pabrik sampai tempat kerja UMKM karena masyarakat dilarang untuk keluar rumah dengan waktu yang telah ditentukan pemerintah. Dengan adanya begitu para pelaku usaha menjadi kehilangan pelanggan dan para pekerja juga berdampak kehilangan lapangan pekerjaan(Supriatna, 2020b).

Pada saat itu vaksin covid-19 masih belum di temukan masih dalam tahap proses pengujian, di sela itu pemerintah juga merencaranakan pemulihan ekonomi nasional sebagai upaya perlindungan sosial kepada para duafa dan para pelaku menengah hingga usaha mikro kecil agar para usaha mereka tetap bisa berjalan semana mestinya agar mengurangi adanya pemutusan hubungan kerja. Insentif fiskal juga ditegakkan, kebijakan perpajakan diterapkan guna mempermudah masyarakat delam segi layanan perpajakan(Tuwu, 2020).

Setelah menunggu beberapa bulan akhirnya vaksin Covid-19 ditemukan yang membuat para masyarakat senang karena sedikit membawa perubahan karena masyarakat lebih kebal dengan adanya virus covid-19. Serta diharapkan dengan adanya pemberian vaksin bisa menjadi langkah awal untuk memulihkan ekonomi dan pelaksaan reformasi negara yang lebih baik lagi. Berdasarkan hasil dari apa yang telah di ssampaikan Menteri Keuanga yaitu Sri Mulyani bahwa dana yang telah disiapkan oleh pemerintah dalam APBN 2021 untuk dana kesehatan mengenai vaksin yaitu sebesar Rp 18 trilliun yang ditujukan kepada 160 juta orang.

Peran Kebijakan Fiskal

Kebijakan diskal menurut sudut pandang ekonomi makro dibagi menjadi dua yakni kebijakan fiskal kontraktif dan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan kontraktif yang mengarah kenaikan harga barang atau jasa secara konstan yang cepat namun jika kebijakan fiscal ekspansif bertujuan untuk memajuakn ekonomi dan menghindari adanya resesi. Saat perbelanjaan masyarakat tinggi dan berlebih yang mengakibatkan *overheating*, disini kebijakan fiskal kontraktif berperan karena dapat menaikkan dan menurunkan pajak. Tujuan kebijakan fiscal kontraktif yaitu menselaraskan kondisi permintaan serta penyediaan barang dan jasa sebagai ladang perekonomian. Sedangkan saat kondisi ekonomi yang krisis, kebijakan fiskal ekspansif berperan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak(Rahmawati, 2008). Tujuan adanya kebijakan fiskal ekspansif yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi adanya pengangguran(Lativa, 2021a).

Adanya kebijakan fiskal diharap dapat mengatur serta mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara melalui APBN. Kebijakan fiskal bertujuan menyeimbangkan makroekonomi serta mengarahkan agar menuju perekonomian yang lebih baik.

Pemasukan utama pemerintah berasal dari pajak, non pajak, dan sumber daya awal. Pajak disini terdapat bebrapa jenis antara lain: (1) pajak pendapatan (PPh), (2)pajak bumi dan bangunan (PBB), (3)pajak pertambahan nilai barang dan jasa(PPn), (4) pajak ekspor, (5) pajak *real estate* (BPHTB), (6) pajak penjualan barang-barang mewah (PPnBm), (7) pajak dokumen berharga, (8) pajak masuk, (9)cukai.(Maipita *et al.*, 2010). Dalam APBN 2021 pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp 1.743,6 trilliun, dan 82,8% itu berasal dari penerimaan pajak yang didapat sebesar Rp 1.444,5 trilliun, dalam hal ini pajak masih menjadi intrumen APBN yang terbesar(Lativa, 2021b).

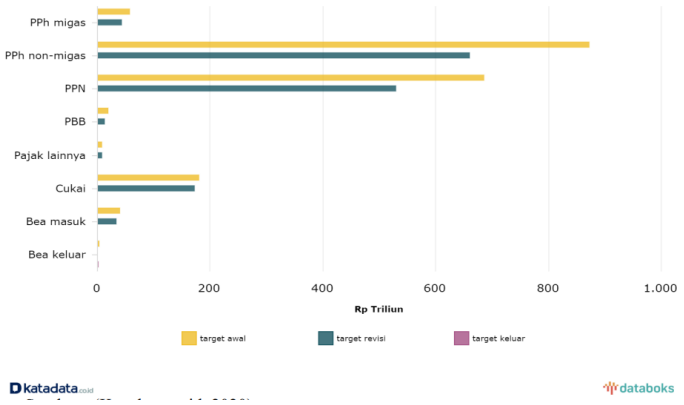

Gambar 1 1

Pada gambar 1 1 dapat kita lihat grafik yang menunjukan penurunan produktivitas para pelaku usaha akibat roda perekonomian pajak mengalami penurunan yang cukup pesat dampak adanya pandemi Covid-19.

Peran kebijakan fiskal sangat diperlukan dalam kasus ini salah satunya pemerintah mengeluarkan UU No 2 tahun 2020 mengenai pemberian relaksasi defisit APBN bisa diperbesar di atas tiga persen dalam kurun waktu tiga tahun(Pratiwi, Nurlaily and Artha, no date). Undang Undang itu dibuat karena kebutuhan belanja negara untuk pememenuhan kebutuhan masyarakat berupa Kesehatan serta perenomian akan meningkat saat pendapatan negara mengalami penurunan, begitu kira-kira yang dikatakan Presiden Joko Widodo dalam menyampaiakan Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021 saat Rapat Paripurna Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada hari Jum'at, 14 Agustus 2020(Aqmarina and Furqon, 2020).

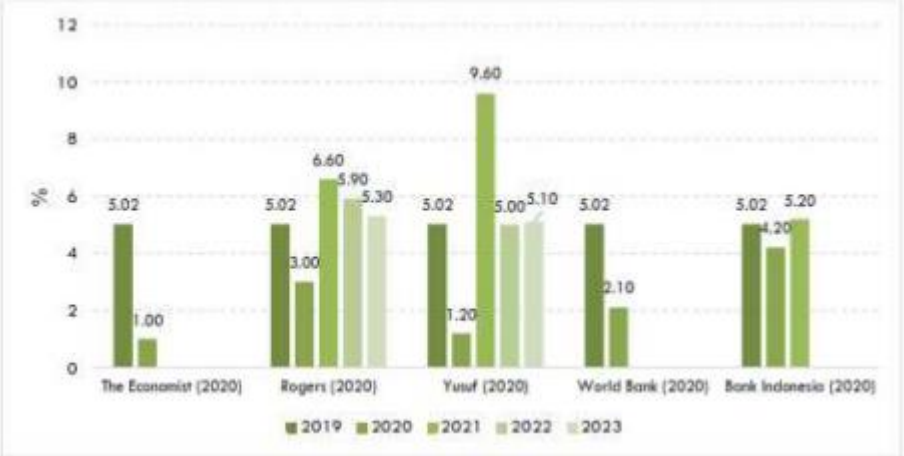

Gambar 2 1

Dapat kita lihat dari grafik pada Gambar 2 1 jika tingkat pengangguran serta lonjakan masyarakat miskin meningkat akibat wabah Covid-19. Dalam permasalahan ini peran

pemerintah sangat penting, beberapa upaya bisa dilakukan seperti menyediakan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas (SDM) karena merupakan aset masyarakat menengah ke bawah yang dapat mengurangi kemiskinan(Wibowo and Oktivalerina, 2022).

Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah bisa merubah perekonomian masyarakat yang menjadikan kesesuaian dengan distribusi pemasukan harapan masyarakat. Salah satu yang berpengaruh yaitu melalui pajak yang progresif dan pemberian bantuan subsidi pada masyarakat(Kuntadi, Anggriawan and Suryadi, 2022). Pemberian subsidi disini bisa berupa minyak berupa BBM maupun non industri, pupuk, dan pembangunan rumah pemerintah bersubsidi. Upaya lain untuk membantu masyarakat, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya seperti pemberian keringanan pajak. Pembebasan bea cukai juga mengenai barang impor untuk pengembangan industri dalam negri, pemenuhan dalam kesehatan, kenaikan kartu anggaran kerja, pelayanan pembayaran nasabah KUR yang diberi keringanan, antisipasi defisit APBN, subsidi harga listrik, perlindungan sosial dan juga membuat Peraturan Undang Undang(Dariah and Irfani, 2002).

BAB V

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 merupakan wabah yang mematikan dengan persebaran virus yang sangat cepat, hampir seluruh negara di dunia mengalami kasus ini. Strategi demi strategi dilakukan untuk menghambat persebaran penularan virus Covid-19 seperti diberlakukannya PKM, PSBB, selain itu pemerintah juga melukakan upaya pemberian vaksin. Namun tak bisa dipungkiri juga akibat adanya Covid-19 bebrapa aspek kehidupan berubah, contohnya yang dulunya masyarakat keluar pergi kemana saja bebas bersentuhan secara langsung, dan tanpa menggunakan pelindung, lain halnnya saat terdampak Covid-19 yaitu para masyarakat harus menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari kontek langsung dengan benda dan mahkluk hidup, selain itu masyarakat saat berpergian juga diwajibkan menggunakan masker berlapis. Pandemi Covid-19 juga sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat maupun pendapatan negara. Pada saat Covid-19 Indonesia mengalami krisis ekonomi, namun pemerintah dalam hal ini tentunya tidak tinggal diam. Pemerintah melakukan beberapa upaya dengan mengeluarkan kebijakan fiskal. Dimana kebijakan fiskal ini ditegakkan oleh pemerintah yang diharapkan dapat mempengaruhi Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dan kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal sangat berhungan sekali dengan APBN karena diharap dapat mengatur serta mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara melalui APBN. Kebijakan fiskal bertujuan menyeimbangkan makroekonomi serta mengarahkan agar menuju perekonomian yang lebih baik. Karena pertumbuhan ekonomi adalah syarat agar tidak terjadi kemiskinan (Hardinandar, no date). Dalam hal penangaman masalah yang melanda perekonomian Indonesia pemerintah melakukan beberapa upaya membantu masyarakat Indonesia yang terkena danpak akibat adanya covid-19. Upaya itu anatara lain seperti pemberian subsidi BBM, token listrik, pembayaran listrik, keringanan pembayaran pajak, pembebasan pembeaan cukai,

DAFTAR PUSTAKA

Nafia'ah, B., Arifin, N.R. and Haq, F. (2021) 'MODEL INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM DALAM PENANGANAN COVID-19'.

Aqmarina, F. and Furqon, I.K. (2020) 'PERAN PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENGANTISIPASI KRISIS EKONOMI PADA MASA PANDEMI COVID-19', 03(02). Available at: www.febi.metrouniv.ac.id;

Alfarisy, F. *et al.* (2020) 'Kajian Budaya: Kebijakan Bahasa di Tengah Pandemi Covid19', *ANUVA*, 4(3), pp. 343–353.

Alia Akhmad STMIK Duta Bangsa Surakarta, K. (2015) *Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta)*.

Kuntadi, C., Anggriawan, G. and Suryadi, D. (2022) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan APBN'. Available at: https://doi.org/10.31933/jimt.v4i2.

Aqmarina, F. and Furqon, I.K. (2020) 'PERAN PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENGANTISIPASI KRISIS EKONOMI PADA MASA PANDEMI COVID-19', 03(02). Available at: www.febi.metrouniv.ac.id;

Atmaja, H.E. and Verawati, D.M. (2021) 'PELUANG BISNIS DI ERA COVID-19'.

Dariah, A.R. and Irfani, A. (2002) 'PERAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA'.

Hanifa, N., Wajuba, L. and Fisabilillah, P. (2021) 'PERAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19'. Available at: http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare.

Hardinandar, F. (2020) 'Peran kebijakan fiskal terhadap trade-off antara ketimpangan dan kemiskinan di indonesia'. Available at: http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI.

Heliany, I. (2021) 'Prosiding Seminar Stiami Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia', 8(1).

Isnaini, D. (2017) *PERANAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM SEBUAH NEGARA*.

Jurnal, S.(and Saham, E. (2021) 'SEKURITAS Analisa terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19 ARTICLES INFORMATION ABSTRACT', *Keuangan dan Investasi)*, 4(2), pp. 118–130. Available at: www.djkn.kemenkeu.go.id,.

Krisna, A.B. (2020) *KEBIJAKAN FISKAL*.

Lativa, S. (2021a) *ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN*, *Jurnal Ekonomi*.

Lativa, S. (2021b) *ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN*, *Jurnal Ekonomi*.

Maipita, I. *et al.* (2010) *DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP KINERJA EKONOMI DAN ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA*.

Seftarita, C. (2005) *KEBIJAKAN FISKAL, KEBIJAKAN MONETER, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA*.

Nafi'ah, B., Arifin, N.R. and Haq, F. (2021) 'MODEL INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM DALAM PENANGANAN COVID-19'.

Nasruddin, R. and Haq, I. (2020) 'Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah', *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7). Available at: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569.

Pratiwi, R.R., Nurlaily, H. and Artha, D. (no date) 'nalisa Yuridis Penetapan Covid 19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia'.

Rahmawati, L. (2008) *Kebijakan Fiskal dalam Islam*.

Rahmawati, L. (2016) *Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam*, *Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam*.

Silalahi, D.E. and Ginting, R.R. (2020) 'Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19', *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), pp. 156–167. Available at: https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193.

Subandi (2011) *DESKRIPSI KUALITATIF SEBAGAI SATU METODE DALAMPENELITIAN PERTUNJUKAN*.

Supriatna, E. (2020a) 'WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID 19) DALAM PANDANGAN ISLAM', *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(6). Available at: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247.

Supriatna, E. (2020b) 'WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID 19) DALAM PANDANGAN ISLAM', *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(6). Available at: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247.

Suryani, R. (no date) *PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASA PANDEMI COVID-19 PERUSAHAAN TERANCAM DAPAT DIPAILITKAN*.

Tuwu, D. (2020) 'KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19', *Journal Publicuho*, 3(2), p. 267. Available at: https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535.

Wayan Wardani, N. (no date) 'Analisis Pesebaran Penularan Virus Corona Di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Metode K-Means Clustering'. Available at: http://jurnal.mdp.ac.id.

Wibowo, E.A. and Oktivalerina, A. (2022) 'Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010 - 2018', *Bappenas Working Papers*, 5(1), pp. 97–119. Available at: https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.117.

Wijayanti, A. (no date) *PERAN KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI RESESI EKONOMI AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19*, *Jurnal Kontemporer Akuntansi*.